

# **Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam *Belt and Road Initiative*: Implikasi terhadap Perdagangan Dan Investasi**

**Gita Diandra Paramitha**

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

e-mail: [gitadiandra15@gmail.com](mailto:gitadiandra15@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This research aims to understand how the BRI can promote trade between the two countries and increase Chinese and other foreign investments in Indonesia. Based on neoliberal theory, which emphasizes the importance of free trade and foreign investment as drivers of economic growth, we also examine the concept of international cooperation to understand how this collaboration is designed to achieve common goals, particularly in the context of infrastructure development and economic enhancement. The study finds that BRI cooperation has significantly benefited Indonesia's economy. Through large-scale infrastructure development and increased investment, the BRI has helped accelerate economic growth and strengthen Indonesia's domestic and international connectivity. The implementation of projects such as ports and power plants shows positive impacts on the quality and capacity of infrastructure, making Indonesia more attractive to foreign investors. The increase in bilateral trade and diversification of traded products are also positive outcomes of this cooperation. This study provides valuable insights for policymakers and other stakeholders on the importance of international cooperation in enhancing a country's economic well-being. Besides economic benefits, BRI cooperation also supports financial inclusion and community empowerment in Indonesia.*

**Keywords: Belt and Road Initiative, International Cooperation, Foreign Investment, International Trade**

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Belt and Road mendorong perdagangan antar negara dan meningkatkan investasi Tiongkok dan asing lainnya di Indonesia. Berdasarkan teori neoliberal yang menekankan perdagangan bebas dan investasi asing sebagai penggerak ekonomi, kami juga mengkaji konsep kerja sama internasional dalam konteks pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kerja sama Belt and Road akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui pembanguna infrastruktur yang luas dan peningkatan investasi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan konektivitas domestik dan internasional. Implementasi proyek-proyek seperti pelabuhan dan pembangkit listrik akan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur, menjadikan Indonesia lebih menarik bagi investor asing. Peningkatan perdagangan bilateral dan diversifikasi produk juga merupakan hasil positif dari kerja sama ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya kerja sama internasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain manfaat ekonomi, kerja sama Belt and Road juga mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.*

**Kata Kunci: Belt And Road Initiative, Kerjasama Internasional, Pembangunan Infrastruktur, Investasi Asing, Perdagangan Internasional**

## **Pendahuluan**

Indonesia dengan China sudah menjalin hubungan cukup lama dan hal ini akan selalu menarik untuk dibahas. Pada abad-21 merupakan abad kebangkitan China atau biasa disebut "*The Rise of China*". Cina juga telah memperlihatkan kemampuannya sebagai kekuatan regional di Asia dan dipertimbangkan dapat memainkan peran sebagai hegemon global setelah Amerika Serikat. Kemampuan Cina ini dapat dilihat dari kebijakan Presiden Cina Xi Jinping dalam mewujudkan program *Belt and Road Initiative* (BRI)

*Belt and Road Initiative* (BRI) itu sendiri merupakan sebuah inisiatif skala besar yang berasal dari Tiongkok. Tujuan dari BRI untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran global, dengan Tiongkok sebagai kekuatan utama. BRI didasari oleh filosofi "*Community of Shared Future for Mankind*" menekankan peran aktif Tiongkok dalam pembangunan berkelanjutan secara global (Odemus, 2023). Hal ini terlihat dengan Tiongkok yang telah berhasil membangun hubungan diplomatis dengan 151 dari 200 negara yang terlibat dalam BRI. Keberhasilan ini dapat terjadi dikarenakan BRI mengusung norma alternatif. Konsep "norma alternatif" dalam program Jalur dan Jalan (BRI) adalah tentang mengadopsi aturan dan prinsip baru yang beda dari yang biasa dalam hubungan antar negara. Di BRI, aturan baru ini dirancang untuk mendorong kerja sama di antara negara-negara yang terlibat, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan membangun infrastruktur (Ilham, 2021).

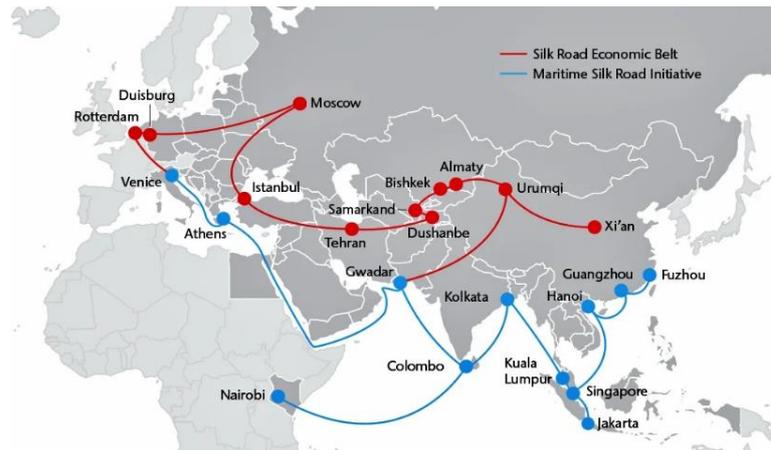
Aturan baru ini di BRI berfokus pada saling untung, kerja sama, dan memajukan pembangunan ekonomi lewat proyek-proyek infrastruktur. Ini berbeda dari aturan biasa dalam hubungan internasional yang lebih menekankan persaingan dan kepentingan nasional satu negara tanpa memikirkan negara lain. Aturan baru di BRI juga dibuat sebagai respons atas kelemahan hubungan internasional yang sudah ada, yang sering dikritik karena berdasarkan kekuasaan dan kepentingan nasional. Aturan baru di BRI bertujuan untuk mendorong pendekatan yang lebih ramah dan saling bantu di antara negara-negara, yang dipercaya lebih efektif dalam memajukan ekonomi dan mengurangi konflik.

Jadi, konsep "norma alternatif" dalam BRI adalah tentang menerima aturan baru yang mendorong kerja sama di antara negara-negara dan bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi lewat proyek-proyek infrastruktur. Sehingga kebijakan BRI bisa lebih dapat diterima oleh berbagai negara. Konsep yang diusung oleh Xi Jinping ini erat terkait dengan model kepemimpinan Tiongkok dan visi kebangkitan Tiongkok melalui BRI (Darmawan et al, 2022).

BRI menjadi sebuah strategi ekonomi yang melibatkan 70 negara dan lebih dari dua pertiga populasi dunia. Kebijakan BRI ini termasuk proyek geoekonomi paling ambisius dalam sejarah Tiongkok modern. Tiongkok memprioritaskan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa dalam mencapai tujuan strategis ini. Dalam pengembangannya, Tiongkok telah membangun jaringan perdagangan dan investasi yang luas serta mendirikan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, yang menyediakan pendanaan awal hingga USD40 miliar untuk pengembangan program BRI (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2023).

Penelitian tahun 2018 oleh Oxford Economics dan CIMB ASEAN Research Berdasarkan Institute, nilai proyek BRI di seluruh ASEAN mencapai lebih dari \$739 miliar. Indonesia menjadi penerima investasi BRI terbesar dengan nilai \$171 miliar, disusul Vietnam (\$152 miliar), Kamboja (\$104 miliar), Malaysia (\$98,5 miliar), dan seterusnya (Phidel Vinales, 2019 dalam Matamata Politik, 2019). Dengan demikian, BRI merupakan salah satu strategi *soft*

power China di kawasan Asia Tenggara untuk menyeimbangkan pengaruh negara besar seperti Amerika Serikat yang telah lama mendominasi kawasan tersebut.



Gambar 1. Peta Belt and Road Initiative  
Sumber: (Untung, 2019)

Dalam peta Belt and Road Initiative yang disinggung sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati jalur BRI. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah berlangsung lama, dimulai sejak kedatangan komunitas Tiongkok di Indonesia, sehingga kerjasama Indonesia dan Tiongkok telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Soekarno, yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1953 (Soviyaningsih, 2019).

Begitupula dengan kebijakan BRI yang dilakukan oleh Tiongkok. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah bergabung dalam BRI sejak tahun 2016. Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok meliputi berbagai bentuk bantuan berupa keuangan dan tenaga kerja. Bantuan ini diberikan untuk pembangunan infrastruktur yang disokong BRI. Tujuan pembangunan infrastruktur ini untuk meningkatkan ekonomi politik Indonesia. BRI juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan terhadap tatanan politik dan ekonomi regional.

Kolaborasi antara Indonesia dan China melalui Belt and Road Initiative (BRI) telah menghasilkan berbagai dampak positif bagi Indonesia. BRI telah berkontribusi pada peningkatan investasi dan perdagangan antara kedua negara, serta memajukan infrastruktur dan teknologi di Indonesia. Selain itu, BRI juga turut berperan dalam memperluas inklusi dan pemahaman keuangan di Indonesia, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang beragam. Secara keseluruhan, kerjasama antara BRI dan Indonesia telah membawa dampak positif yang signifikan bagi kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia (Imeliya, 2021).

Negara-negara tetangga di Kawasan Asia dapat merasa perlu untuk mempertahankan keseimbangan antara hubungan dengan Tiongkok dan kepentingan regional mereka sendiri. Kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat dalam infrastruktur kunci, seperti pelabuhan dan jalur perdagangan, memunculkan pertanyaan tentang kontrol dan pengaruh yang dimiliki Tiongkok dalam kawasan tersebut (Maudisha, 2022).

Hubungan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dan erat. Di bawah pemerintahan Presiden Abdurahman, Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan Tiongkok pada tanggal 15 Januari 1950. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kedua negara mulai menjalin hubungan perdagangan yang kemudian berkembang pesat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Indonesia merupakan pasar yang signifikan bagi Tiongkok, menjadi destinasi ekspor terbesar sekaligus mitra impor yang substansial. Hubungan perdagangan antara kedua negara terus meningkat, dengan Tiongkok menjadi salah satu mitra perdagangan utama bagi Indonesia. Meskipun demikian, hubungan perdagangan terkadang juga mengalami ketegangan, terutama terkait dengan isu-isu seperti yang terjadi di perairan Natuna yang masih terus dikecam oleh Tiongkok (Sianturi, 2018).

Tiongkok tengah giat mendorong Belt and Road Initiative (BRI), sebuah gagasan yang menjanjikan peluang kerjasama luas di berbagai sektor ekonomi. Cakupan BRI meliputi manufaktur teknologi baru, infrastruktur, teknologi informasi, pertambangan, dan proyek-proyek strategis lainnya. Visi kerjasama lintas batas yang diusung BRI membuka peluang bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kerjasama guna mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan (Setiawan, 2023).

Hubungan investasi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Investasi Tiongkok di sektor-sektor kunci Indonesia, seperti infrastruktur dan manufaktur, mengalami pertumbuhan pesat. Volume perdagangan kedua negara pun terus meningkat, menunjukkan eratnya hubungan ekonomi bilateral. Dalam kerangka BRI, Indonesia berpotensi menjadi mitra kunci Tiongkok. Populasi besar dan ekonomi dinamis Indonesia menjadikannya tujuan investasi menarik bagi perusahaan Tiongkok. Di sisi lain, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi, sumber daya, dan pengalaman Tiongkok untuk mengembangkan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya (Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, 2024).

Perkembangan Belt and Road Initiative (BRI) memberikan banyak peluang baru bagi kedua negara untuk mempererat hubungan ekonomi mereka. Inisiatif ini membuka pintu bagi berbagai proyek infrastruktur dan investasi yang dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi bilateral.

## **Kerangka Teoritis**

### **Neoliberalisme**

Neoliberalisme pada dasarnya adalah teori tentang praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat paling baik ditingkatkan dengan membebaskan kebebasan dan keterampilan berwirausaha individu dalam kerangka institusional yang ditandai oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Peran negara adalah untuk menciptakan dan memelihara kerangka institusional yang sesuai dengan praktik-praktik tersebut. Negara harus menjamin, misalnya, kualitas dan integritas uang. Negara juga harus mendirikan struktur dan fungsi militer, pertahanan, kepolisian, dan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak milik pribadi dan menjamin, dengan kekuatan jika perlu, fungsi pasar yang tepat. Selain itu, jika pasar tidak ada (di bidang seperti tanah, air, pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, atau polusi lingkungan) maka mereka harus diciptakan, dengan tindakan negara jika perlu. Tetapi di luar tugas-tugas ini, negara tidak boleh mencampuri. Intervensi negara dalam pasar (setelah diciptakan) harus minimal karena, menurut teori tersebut, negara tidak mungkin memiliki cukup informasi untuk menebak sinyal pasar (harga) dan karena kelompok kepentingan yang kuat akan secara tak terelakkan mengubah dan memiringkan intervensi negara (terutama dalam demokrasi) untuk keuntungan mereka sendiri (Harvey, 2005; 2).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Keohane (1984: 51), kerjasama internasional dapat terjadi ketika suatu negara bisa menyesuaikan pola perilaku mereka dengan preferensi aktual sehingga sebuah kebijakan benar-benar diikuti oleh satu pemerintah dan dapat

dikatakan sebagai sebuah fasilitas terhadap mitra kerjasamanya untuk merealisasikan tujuan mereka sendiri.

Para pendukung neoliberalisme melihat Belt and Road Initiative (BRI) sebagai peluang besar untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan mempercepat pertumbuhan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa masuknya investasi asing dan peningkatan kerjasama perdagangan melalui BRI dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Selain itu, proyek-proyek ini diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Di samping manfaat ekonomi, BRI juga dianggap dapat memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Peningkatan kerjasama ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mempererat hubungan politik dan diplomasi antara kedua negara. Dengan hubungan yang lebih erat, stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dapat semakin terjaga, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran bersama.

### **Kerja Sama Internasional**

Kerja sama internasional adalah sebuah konsep yang melibatkan interaksi positif antara dua negara atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Menurut pakar hubungan internasional Robert Keohane, kerja sama internasional terjadi ketika pihak-pihak, dalam hal ini negara, berinteraksi satu sama lain melalui berbagai kebijakan yang disepakati bersama. Tujuan utama kerja sama ini adalah untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif lingkungan eksternal, seperti konflik bersenjata, ketegangan politik, dan ketidakstabilan ekonomi, yang dapat merugikan kedua belah pihak (Milner, 1992).

Dalam konteks kerja sama internasional, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan bersama ini dapat berbeda-beda tergantung pada fokus kerja sama. Kebijakan ekonomi mencakup, misalnya, kerja sama dalam perdagangan internasional, penanaman modal asing, dan pembangunan infrastruktur bersama. Kebijakan politik, di sisi lain, dapat mencakup kerja sama dalam diplomasi, penyelesaian konflik, dan pembuatan peraturan internasional yang mengatur interaksi antar negara. Di sisi lain, kebijakan keamanan dapat mencakup kerja sama dalam memerangi terorisme, proliferasi nuklir, atau respons terhadap bencana alam berskala internasional.<sup>1</sup>

Salah satu aspek penting dalam kerja sama internasional adalah kedua belah pihak harus bekerja sama dan sepakat untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan nasional masing-masing. Hal ini memerlukan komunikasi yang efektif, saling pengertian dan kompromi antara negaranegara yang terlibat. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi salah satu instrumen terpenting untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di tingkat global.

Dalam *konteks Belt and Road Initiative (BRI)*, kerjasama antarnegara menjadi krusial dalam melaksanakan program ini. BRI merupakan proyek global untuk membangun infrastruktur yang didorong oleh pemerintah Tiongkok, dengan tujuan meningkatkan hubungan dan kerjasama antarnegara melalui investasi dalam pembangunan jalan, rel, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya di berbagai negara di seluruh dunia (Ilham, 2021).

Kaitan BRI dengan paham neoliberalisme terletak pada penekanan pada pentingnya kerjasama ekonomi internasional dan pembukaan pasar global. Dalam konteks BRI, Tiongkok menganut pendekatan neoliberal dengan mendorong perdagangan bebas, investasi asing, dan integrasi ekonomi antarnegara. Namun, sejumlah kritikus menyoroti bahwa BRI juga mencakup unsur-unsur non-neoliberal seperti pengaruh politik, utang, dan kurangnya

---

transparansi dalam proyek-proyek infrastruktur. (Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping (Ristiyani, 2018).

Neoliberalisme juga merupakan gagasan yang menekankan pentingnya kerjasama ekonomi antarnegara dan peran lembaga-lembaga dalam hal itu. Ini berbeda dengan pandangan bahwa kekuatan politik adalah yang utama. Menurut neoliberalisme, kerjasama bisa mencegah konflik antarnegara. (Dunne; Tim Milja Kurki, S.S, “*International Relation Theory, Discipline and Diversity, (eds.)*”, Oxford University Press (2007)) Hal ini memenuhi kekurangan dari sudut pandang lain yang lebih menekankan kekuasaan politik. Dalam pemikiran neoliberal, interdependensi berarti bahwa rakyat dan pemerintah saling tergantung satu sama lain, dan hubungan yang paling tinggi adalah antarnegara. (Dugis, V, “*Analysing Foreign Policy*”, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik (2007)

Studi oleh Li, Xing, dan Zhang (2019) menyoroti bahwa BRI mencerminkan pendekatan neoliberalisme khas Tiongkok yang menggabungkan elemen perdagangan bebas dengan campur tangan pemerintah yang kuat dalam proyek infrastruktur global. Mereka menunjukkan bahwa BRI memberikan peluang besar bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga menimbulkan tantangan dan risiko yang perlu ditangani dengan hati-hati. Secara keseluruhan, kerjasama internasional dalam konteks BRI mencerminkan kompleksitas hubungan antara neoliberalisme, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan nasional. Meskipun BRI menawarkan potensi untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi global, perhatian serius diperlukan terhadap masalah transparansi, keberlanjutan lingkungan, dan dampak politik dalam pelaksanaannya (Ilham, 2021).

Dalam kerja sama Internasional secara otomatis akan terjadi Perdagangan internasional juga, dalam konteks *Belt and Road Initiative* (BRI) sangat erat hubungannya dengan prinsip-prinsip neoliberalisme. Menurut pandangan neoliberalisme, perdagangan internasional merupakan alat untuk mendorong ketergantungan ekonomi dan kerja sama antar bangsa dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mengurangi hambatan perdagangan. BRI, sebagai proyek infrastruktur besar-besaran, bertujuan untuk mempermudah arus barang, jasa, dan modal di berbagai wilayah untuk memajukan integrasi ekonomi dan kerja sama di antara negara-negara yang terlibat. Fokus BRI pada pembangunan infrastruktur seperti jaringan transportasi, sistem energi, dan telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan koneksi dan daya saing negara-negara yang terlibat, memudahkan kegiatan bisnis dan memastikan akses masyarakat terhadap layanan dan barang. Dengan demikian, diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan volume perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena negara-negara menjadi lebih terhubung dan bergantung satu sama lain (Hamdani, 2019).

Neoliberalisme juga menyoroti pentingnya peran institusi dalam mempromosikan perdagangan internasional dan kerja sama. Kerangka institusional BRI, termasuk Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dan Dana Jalur Sutra, dirancang untuk memberikan dukungan dan pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur, sehingga memfasilitasi arus barang dan jasa di berbagai wilayah. Kerangka institusional ini dianggap sebagai elemen kunci dari BRI karena memberikan platform bagi negara-negara untuk bekerjasama dan berinvestasi di ekonomi satu sama lain (Ilham, 2021).

Secara keseluruhan, perdagangan internasional dalam konteks BRI sangat terkait dengan prinsip-prinsip neoliberalisme, yang menganggap perdagangan internasional sebagai sarana untuk memperkuat ketergantungan ekonomi dan kerja sama di antara bangsa-bangsa. Fokus BRI pada pembangunan infrastruktur dan kerangka institusionalnya bertujuan untuk meningkatkan koneksi dan daya saing negara-negara yang terlibat, dengan demikian mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kerja sama.

Selain itu dalam Kerjasama internasionala di dalamnya juga ada investasi internasional Investasi internasional, yang juga dikenal sebagai Foreign Direct Investment (FDI),

merupakan aliran modal internasional di mana perusahaan dari satu negara memperluas atau mendirikan perusahaan di negara lain. FDI ini dapat berbentuk pembukaan perusahaan atau cabang baru di negara tujuan, penggabungan dengan perusahaan asing, atau mengakuisisi perusahaan asing atau domestik yang sudah ada di negara lain (Afin & Oktarani, 2018).

Dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI), investasi internasional memainkan peran yang sangat penting. Melalui BRI, aliran FDI dari Tiongkok ke berbagai negara peserta, termasuk Indonesia, mengalami peningkatan yang signifikan. Inisiatif ini tidak hanya membawa modal masuk tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

FDI melalui BRI juga memiliki efek spillover yang berarti bagi negara tujuan. Selain menyediakan modal, FDI membawa serta transfer teknologi asing, peningkatan kemampuan manajerial, dan perbaikan daya saing internasional bagi perusahaan domestik. Teknologi dan manajemen yang lebih maju dari perusahaan Tiongkok dapat membantu perusahaan lokal di Indonesia dan negara-negara lain di sepanjang jalur BRI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, FDI dianggap sebagai salah satu sumber daya modal yang penting. Negara-negara dengan ekonomi terbuka, seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, sangat membutuhkan FDI karena sering kali modal dalam negeri tidak mencukupi untuk mendukung proyek-proyek besar. Melalui BRI, investasi dari Tiongkok membantu mengisi kekurangan modal tersebut, mempercepat pembangunan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, FDI dalam kerangka BRI juga membantu meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara melalui eksternalitas teknologi dan efisiensi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan aliran FDI. Eksternalitas teknologi meningkatkan kapabilitas teknologi suatu perekonomian, sedangkan eksternalitas efisiensi berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang lebih baik, termasuk teknologi yang sudah ada. Hal ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang berusaha meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi mereka melalui peningkatan investasi internasional.

Dengan demikian, Belt and Road Initiative tidak hanya memperluas jangkauan FDI Tiongkok ke negara-negara lain tetapi juga menciptakan peluang besar untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Afin R. Yulistiono. Oktarani A. N.(2008).”Perdagangan Internasional, Investasi Asing, dan, Efisiensi Perekonomian Negara-Negara ASEAN”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Secara umum penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang fokus mengkaji bagaimana fenomena sosial dikaji melalui aspek-aspek yang relevan, terutama aspek waktu, tempat, lembaga, dan fenomena (Satori & Komariah, 2017)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari situasi masalah yang dipilih, dengan menggunakan data yang ada untuk menggambarkan realitas yang kompleks Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Untuk melengkapi data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan Penggunaan data - Data sekunder Data yang dikumpulkan dari perpustakaan, majalah, buku, artikel, media elektronik, website, Sumber informasi lain yang dapat mendukung penelitian tersebut juga diintegrasikan ke dalam data yang diklasifikasikan, disusun, diringkas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan tergantung pada pertanyaan makalah yang sedang ditelaah.

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam *Belt and Road Initiative*

Implementasi kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara sejak diluncurkan pada tahun 2016. Tahun ini, Indonesia secara resmi menyetujui kerja sama dalam program Belt and Road yang dicetuskan Tiongkok. Keputusan ini merupakan hasil upaya diplomasi intensif kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utama kerja sama ini adalah untuk memperkuat integrasi regional serta merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan regional.

Salah satu pendekatan yang paling penting dalam pembangunan suatu negara adalah pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai bidang utama seperti transportasi, energi, dan komunikasi. Infrastruktur yang kuat dan terintegrasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, merujuk pada gambar di atas, terlihat bahwa proyek-proyek strategis Belt and Road Initiative (BRI) tersebar di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini mencakup berbagai inisiatif besar, seperti pembangunan jalur pelayaran yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa menjadi lebih efisien, serta mempercepat waktu pengiriman. Selain itu, perluasan jaringan menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk menghubungkan lebih banyak daerah di Indonesia, memudahkan mobilitas penduduk, dan mendukung distribusi barang ke seluruh pelosok negeri.



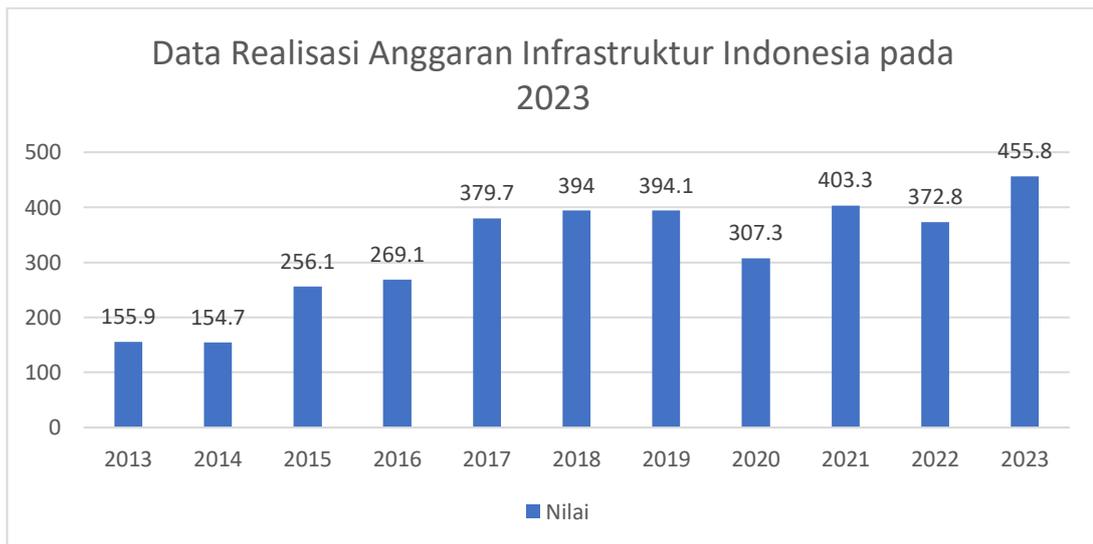
Gambar 2. Peta Sebaran Proyek BRI di Indonesia  
Sumber: (Syahni & Nugraha, 2019)

Pembangunan bandara-bandara baru dan renovasi bandara yang sudah ada turut memperkuat sektor transportasi udara, meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan penerbangan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara Indonesia dan Tiongkok, serta negara-negara tetangga lainnya, sehingga dapat menciptakan jaringan ekonomi yang lebih kuat dan terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, Kerjasama dalam infrastruktur ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah global tetapi juga membuka peluang baru bagi perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>. Oleh karena itu,

pelaksanaan kerja sama ini menjadi landasan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Tiongkok untuk mencapai tujuan bersama di bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Pada tahun 2013, berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki keterbatasan signifikan dalam sektor infrastruktur. Terutama, keterbatasan ini tampak jelas dalam bidang transportasi, pengairan, dan pengelolaan sumber daya alam. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak negatif pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan negara. Oleh karena itu, langkah strategis yang diambil oleh Indonesia untuk mengatasi masalah ini adalah bergabung dengan inisiatif kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) yang dipelopori oleh Tiongkok. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi dan teknologi dari Tiongkok, sehingga mampu meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik (Anggraeni, 2021).

Sejak resmi bergabung dengan Belt and Road Initiative (BRI) di tahun 2015, Indonesia telah merasakan dampak signifikan dalam hal peningkatan dana infrastruktur. Dalam kurun waktu singkat, tercatat pertumbuhan dana infrastruktur mencapai 160%, suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Kementerian Keuangan, mencatat, realisasi sementara anggaran infrastruktur sebesar Rp455,8 triliun pada akhir 2023. Jumlah ini tumbuh 22,2% dibanding tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 22,02% diakibatkan oleh Covid-19 namun setelah itu tetap bisa meningkat, Hal ini terlihat jelas dalam berbagai proyek infrastruktur berskala besar yang telah terealisasi, seperti proyek Pelabuhan Kuala dan berbagai proyek lain yang berkaitan dengan BRI. Dampak positif BRI ini tidak hanya dirasakan dalam skala nasional, tetapi juga membawa manfaat bagi perekonomian lokal. Peningkatan infrastruktur membuka akses ke daerah-daerah terpencil, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat (Saputra, 2023).



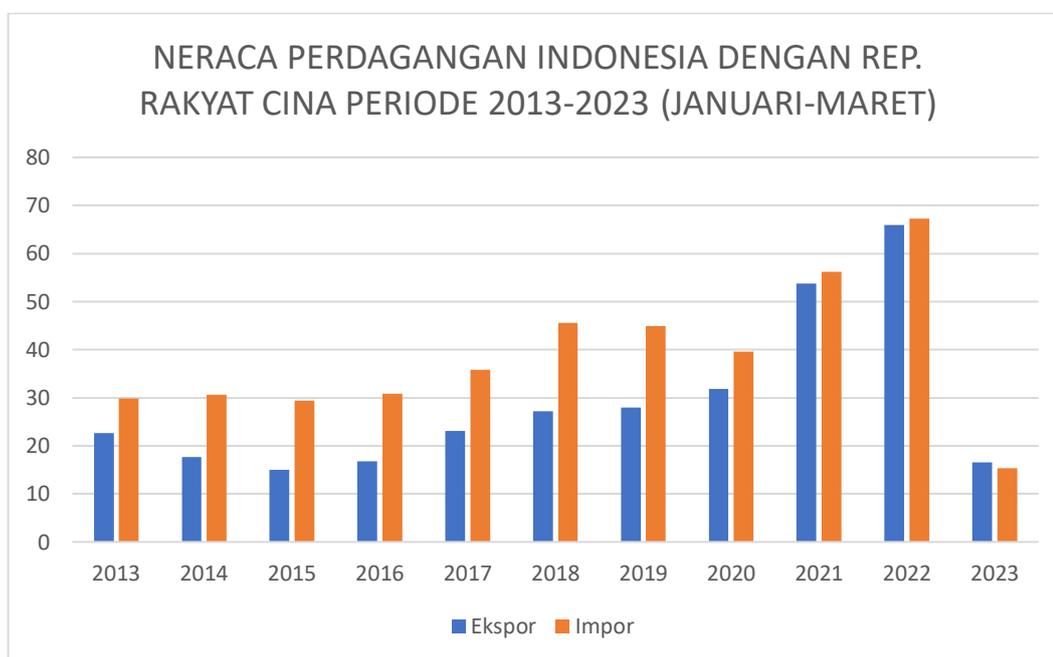
Gambar 3. Realisasi Anggaran Infrastruktur Indonesia 2013-2023

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Belt and Road Initiative (BRI) telah memberikan dampak yang sangat besar dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Melalui inisiatif ini, kapabilitas industri dan transportasi meningkat berkat berbagai proyek besar seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan kereta api cepat. Investasi besar-besaran ini memperkuat jaringan logistik nasional, menurunkan biaya transportasi, dan mempercepat pengiriman barang. Selain itu, pengembangan infrastruktur ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi

asing. Sektor-sektor penting seperti manufaktur, perdagangan, dan pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, Belt and Road Initiative menawarkan peluang besar untuk kemajuan Indonesia di masa depan, tidak hanya melalui penguatan infrastruktur, tetapi juga dengan memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Potensi untuk pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih nyata berkat kerjasama strategis ini.

### **Dampak dari Kerjasama BRI terhadap Perdagangan Indonesia dari sektor Infrastruktur**



Gambar 4. Neraca Perdagangan Indonesia & Rep. Rakyat Cina Periode 2013-2023 (Januari-Maret)

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2023

Peningkatan infrastruktur di bawah inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) telah memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Grafik perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dan Tiongkok dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang mengesankan, dengan puncak ekspor Indonesia ke Tiongkok terjadi pada tahun 2022, melampaui nilai impor untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir. Peningkatan ini erat kaitannya dengan dampak positif dari Belt and Road Initiative (BRI). Akibatnya, perdagangan antara kedua negara semakin kuat dan saling menguntungkan. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar untuk kerjasama bilateral di masa depan, dengan BRI berperan sebagai katalis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang lebih seimbang serta berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa nilai perdagangan bilateral telah meningkat dari 50 miliar dolar AS pada tahun 2013 menjadi 150 miliar dolar AS pada tahun 2022, dengan komoditas utama seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan produk manufaktur yang mengalami peningkatan ekspor yang signifikan. Pembangunan infrastruktur yang masif telah membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi pengiriman, sehingga produk-produk Indonesia dapat dikirim ke Tiongkok dengan lebih cepat dan lebih murah (Kementerian Perdagangan, 2023).

Komoditas batu bara dan minyak kelapa sawit telah menjadi tulang punggung perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Permintaan yang tinggi dari Tiongkok untuk batu bara Indonesia, yang dikenal memiliki kualitas baik, telah mendorong ekspor komoditas ini ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian pula, minyak kelapa sawit Indonesia yang digunakan dalam berbagai industri di Tiongkok, mulai dari makanan hingga kosmetik, terus menunjukkan peningkatan permintaan. Produk manufaktur juga mengalami lonjakan ekspor, seiring dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk yang ditawarkan. Mulai dari tekstil hingga elektronik, produk-produk manufaktur Indonesia semakin diminati di pasar Tiongkok. Peningkatan ini tidak lepas dari peran kebijakan BRI yang mendukung pembangunan industri dan peningkatan kapasitas produksi di Indonesia.

Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) membawa angin segar bagi Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan infrastruktur. Berkat BRI, konektivitas di negara kepulauan ini semakin terhubung. Posisi strategis Indonesia sebagai penghubung antara timur dan barat, serta utara dan selatan, semakin dioptimalkan. Hal ini membuka peluang besar bagi perdagangan dan mobilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. BRI merupakan hasil kerjasama komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok untuk mengembangkan empat koridor ekonomi utama: Sumatera, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Pemilihan koridor-koridor ini didasari oleh potensi besarnya dalam menggerakkan perekonomian regional dan nasional. Melalui proyek-proyek BRI, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam hal efisiensi logistik, daya saing ekspor, dan daya tarik investasi asing (BRIN, 2024).

Proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan kereta api menjadi tulang punggung BRI di keempat koridor tersebut. Peta pembangunan BRI menunjukkan bahwa proyek-proyek ini merupakan bagian integral dari inisiatif besar ini. Pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di Sumatera, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional, melancarkan arus barang dan jasa dengan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, BRI dirasa memberikan dampak positif bagi konektivitas dan perdagangan Indonesia. Peningkatan infrastruktur dan kerjasama antar negara membuka peluang baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (BRIN, 2023).

Dengan hadirnya *Belt and Road Initiative* (BRI), kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak hanya mengalami peningkatan nilai transaksi, tetapi juga terlihat peningkatan dalam variasi dan mutu produk yang diperdagangkan. Dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur melalui BRI terus memberikan kontribusi positif secara ekonomi bagi kedua negara, yang diharapkan akan semakin memperdalam serta memperkuat hubungan perdagangan bilateral di masa yang akan datang. Hal ini mencerminkan transformasi yang sedang terjadi dalam lanskap perdagangan global, di mana BRI memberikan platform untuk kerjasama yang lebih luas dan beragam di antara negara-negara peserta.

### **Dampak Terhadap Investasi Asing di Indonesia**

Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dipelopori oleh Tiongkok telah memberikan dorongan signifikan terhadap investasi asing di Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur. Indonesia telah menarik investasi besar dari Tiongkok untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek pelabuhan, jalan tol, dan pembangkit listrik. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur di Indonesia, tetapi juga memperbaiki konektivitas domestik dan internasional. Peningkatan infrastruktur ini membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing karena infrastruktur yang baik adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modal mereka (Xianhua, 2023).

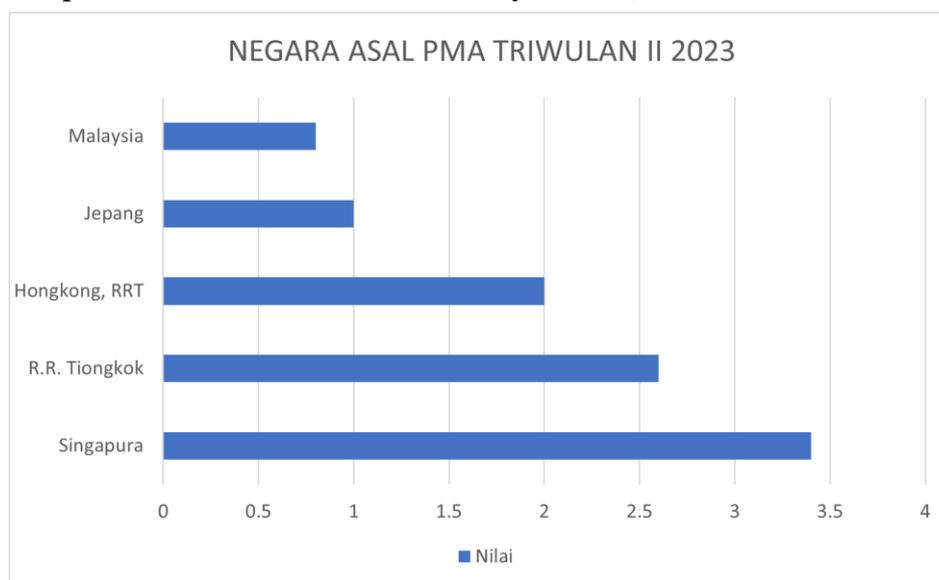
Menurut Laporan Penilaian Sektor Infrastruktur (ISAP) oleh Bank Dunia Indonesia telah menerima investasi langsung yang signifikan dari Tiongkok di berbagai sektor ekonomi,

## *Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Belt and Road Initiative: Implikasi terhadap Perdagangan Dan Investasi*

dengan penekanan khusus pada sektor infrastruktur. Hingga tahun 2022, total investasi di sektor infrastruktur telah mencapai nilai yang mengesankan sebesar 21,5 miliar dolar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi asing ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan substansial, mencerminkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi dari investor asing terhadap potensi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Peningkatan investasi ini tidak hanya mencerminkan persepsi positif terhadap prospek ekonomi jangka panjang Indonesia, tetapi juga menegaskan daya tarik negara ini sebagai tujuan investasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara.

Menurut data yang tersedia menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia sebelum dan sesudah implementasi Belt and Road Initiative (BRI). Sebelum pelaksanaan BRI, yaitu pada tahun 2013, total investasi asing yang masuk ke Indonesia hanya mencapai sebesar 280 juta USD. Ini mencerminkan bahwa pada periode sebelum BRI, minat investor asing terhadap Indonesia relatif rendah, mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi yang kurang mendukung, atau persepsi risiko yang tinggi. Namun, setelah Indonesia mulai berpartisipasi dalam inisiatif BRI yang dipelopori oleh Tiongkok, terjadi perubahan yang besar dalam daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing. Partisipasi dalam BRI membawa banyak proyek infrastruktur besar yang berpotensi meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan kapasitas produksi di berbagai sektor ekonomi. Ini tidak hanya menarik minat investor dari Tiongkok tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dari negara lain yang melihat Indonesia sebagai pasar yang berkembang dengan peluang investasi yang menjanjikan. Sebagai hasilnya, jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan setelah pelaksanaan BRI (Nadzir, 2023).

Setelah Indonesia bergabung dengan inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah investasi asing yang masuk ke negara ini. Pada tahun 2023, investasi asing mencapai 8,6 miliar USD, yang menunjukkan peningkatan sekitar 30 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2013. Menekankan bahwa lonjakan ini sebagian besar didorong oleh investasi dalam sektor infrastruktur, yang menjadi fokus utama BRI di Indonesia. Investasi dalam sektor infrastruktur ini meliputi proyek-proyek besar seperti pembangunan jalur kereta cepat, pelabuhan, jalan tol, dan pembangkit listrik, yang membantu meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, BRI telah membantu meningkatkan konektivitas domestik dan internasional, serta meningkatkan potensi ekonomi Indonesia (Amaliyah, 2023).



Gambar 5. Negara Asal PMA Triwulan II 2023  
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2023

Pada tahun 2023, realisasi investasi di Indonesia terdiri dari dua komponen utama yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan gambar di atas realisasi PMA mencapai Rp744,0 triliun, yang setara dengan 52,4 persen dari total realisasi investasi. Investasi asing ini meliputi berbagai sektor, termasuk infrastruktur, industri, dan jasa, serta berasal dari berbagai negara, termasuk Singapore, Tiongkok, Hongkong, Jepang, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, realisasi PMDN tercatat sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi. Investasi dalam negeri ini meliputi berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, dan industri manufaktur, serta berasal dari berbagai pihak, termasuk perusahaan domestik dan individu. Angka-angka ini menunjukkan bahwa investasi asing memegang peranan penting dalam keseluruhan perekonomian Indonesia, namun investasi dalam negeri juga tetap berkontribusi signifikan (KemenPANRB, 2024).

Keikutsertaan Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh Tiongkok telah membawa dampak positif yang signifikan di berbagai sektor. Selain memberikan dorongan yang kuat dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, keikutsertaan ini juga menjadi katalisator bagi peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Fenomena ini dapat diamati dari peningkatan minat yang signifikan dari investor asing terhadap berbagai proyek strategis yang didukung oleh BRI di Indonesia. Selain itu, hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Tiongkok, sebagai negara inisiator BRI, telah membuka peluang baru bagi investasi dalam sektor ekonomi yang beragam (KemenPANRB, 2024).

### **Kesimpulan**

Indonesia dan Tiongkok telah lama menjalin hubungan erat, terutama dengan kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global melalui Belt and Road Initiative (BRI). BRI bertujuan menciptakan perdamaian dan kemakmuran global dengan menempatkan Tiongkok sebagai kekuatan utama, mengusung visi "Community of Shared Future for Mankind". Inisiatif ini melibatkan pembangunan infrastruktur skala besar dan kerja sama ekonomi di 151 negara. BRI memperkenalkan "norma alternatif" yang lebih menekankan pada kerja sama dan keuntungan bersama, berbeda dengan norma konvensional yang sering berfokus pada persaingan. Pendekatan ini membuat BRI lebih mudah diterima oleh banyak negara yang melihatnya sebagai peluang pembangunan bersama. Sebagai strategi ekonomi besar, BRI mencakup lebih dari 70 negara dan dua pertiga populasi dunia, dengan pendanaan awal sebesar USD 40 miliar melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Nilai proyek BRI di ASEAN mencapai lebih dari USD 739 miliar, dengan Indonesia sebagai penerima investasi terbesar, menunjukkan pentingnya Indonesia dalam strategi global Tiongkok. Sejak bergabung dengan BRI pada 2016, hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin diperkokoh melalui berbagai proyek infrastruktur yang meningkatkan ekonomi politik Indonesia. Proyek besar seperti jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan, dan pembangkit listrik telah menarik investasi besar dari Tiongkok, memperbaiki konektivitas domestik dan internasional, serta membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing. BRI telah membawa dampak positif bagi Indonesia, baik dalam kemajuan ekonomi maupun sosial, serta memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok. Namun, keberlanjutan lingkungan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek tetap menjadi perhatian utama. Keberhasilan BRI di Indonesia bergantung pada pengelolaan proyek yang baik, sesuai dengan kebutuhan nasional, dan meminimalkan risiko utang serta ketergantungan pada Tiongkok.

### **Daftar Pustaka**

- Afsari, I. (2021). *Dampak Positif dan Negatif Belt and road initiative (BRI) Serta Strategi Indonesia*. Jakarta: Kompasiana.
- Anam, K. (2021). *BRI Optimis Tutup Tahun 2023 dengan Kinerja Kian Kinclong*. Jakarta: CNBC.

*Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Belt and Road Initiative: Implikasi terhadap Perdagangan Dan Investasi*

- Anggraeni, T. N. (2021). Kerjasama Cina dengan Indonesia Melalui Belt and Road Initiative dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2018-2020. *Universitas Jendral Soedirman*.
- Anisa, A. (2023). Kerjasama Indonesia-Cina Dalam Kerangka Belt and Road Initiative dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Indonesia (Studi Kasus: Kereta Cepat Jakarta Bandung. *Universitas Pasundan*.
- Arief Bakhtiar Darmawan, R. A. (2022). Konstruksi Ide XI Jinping Dalam Belt And Road Initiative. *Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 1*.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Indonesia - Tiongkok Tingkatkan Hubungan dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Skala Global*. Jakarta: BRIN.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Indonesia-Tiongkok Tingkatkan Hubungan dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Skala Global*. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Firda Amaliyah, R. M. (2023). Kepentingan Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) dalam Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Utara 2017-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 6No. 2*.
- Hamdani, J. (2019). Implementasi Belt and Road Initiative oleh Tiongkok di Terusan Suez Mesir Tahun 2014-2017. *Universitas Katolik Parahyangan*.
- Ilham, A. W. (2021). Pengaruh BRI (Belt and Road Initiative) Terhadap Kerja Sama Ekonomi Tiongkok-Kamboja Periode 2013-2018". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing Republik Rakyat Tiongkok. (2024). *Indonesia Buka Peluang Investasi Energi Terbarukan Miliaran Dolar di China RE Invest Indonesia 2024*. Kementerian Luar Negeri.
- Kementerian Keuangan Fiscal. (2023). *Kemenkeu dan AIIB Perkuat Kerja Sama untuk Mekanisme Transisi Energi*. Kementerian Keuangan Fiscal.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Realisasi Investasi 2023 Capai Rp 1.418,9 Triliun*". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Perdagangan. (2023). *Perdagangan ASEAN - China Sebelum dan Setelah Implementasi Acfta Periode 2013-2022*.
- Nadzir, M. (2023). Investasi Asing dan Investasi dalam Negeri: Pengaruhnya pada pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 14 No .02*.
- Panggih, S. R. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan One Belt - One Road (OBOR) terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok . *Journal of Student Research*.
- Rantasori, R. (2021). Pengaruh Program Belt and Road Initiative Terhadap Pembangunan Jalan Tol Ciisumdawu Jawa Barat. *JOM FISIP Vol. 8 Edisi 11*.
- Sarswati, N. M. (n.d.). Menilik Perjanjian Indonesia China - dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Naional.
- Setiawan, V. N. (2023). *China Tekan Investasi Rp 175 T di RI, Jokowi Janjikan ini*. CNBC.
- Sianturi, E. (2018). Analisis Hubungan Dagangan Tiongkok dengan Indonesia di Era Presiden Jokowi. *Universitas Kristen Indonesia*.
- Soviyaningsih, N. (2019). Kepentingan Indonesia Terhadap One Belt One Road (OBOR) Dalam Upaya Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Universitas Pasundan*.
- Witono, O. B. (2023). *Memahami Belt and Road Initiative dan Implikasinya Terhadap Tatanan Dunia*. Kumparan.
- Xianhua. (2023). *The Belt and Road Initiative: A New Era for International Cooperation*. Xianhua News.